

**IMPLEMENTASI PROGRAM SATU DESA SATU PAUD DI
KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH**

(studi Kasus di Desa Parumahan dan Samhurang)

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana (S1)
pada Program Studi Administrasi Publik



O L E H

LIA PUSPITASARI

NPM : 20.22.077

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI**

2025

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : LIA PUSPITASARI

NPM : 2022077

Program Studi : S1 Administrasi Publik

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM SATU DESA SATU PAUD
DI KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH (STUDI KASUS
DI DESA PARUMAHAN DAN SAMHURANG)

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, 15 November 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Muhamad Arsyad, S.Pd.I, M.A.P.
NUPTK. 5636753654130102



Nida Urahmah, M.Pd.
NUPTK. 6935767668230302



Mengetahui,
Plt. Ketua Prodi Administrasi Publik


Ahmad Baihaqi, S.Sos. M.A.
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM SATU DESA SATU PAUD DI KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH (Studi Kasus di Desa Parumahan dan Samhurang)”**.

Peneliti menyadari bahwa proposal skripsi yang disusun ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran diharapkan dari berbagai pihak. Sebagai manusia biasa, peneliti berusaha dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, dan sebagai manusia biasa juga peneliti tidak luput dari segala kesalahan dan kekhilafan dalam menyusun skripsi ini.

Adapun maksud dan tujuan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mata kuliah Skripsi pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti juga mengucapkan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Dr. Reno Afrian, S.Sos., M.AP., CIQaR., CIQnR.
2. Bapak Ahmad Baihqi, S. Sos, M.A selaku Plt. Ketua Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan arahan dan motivasi yang sangat berharga bagi perkembangan akademik mahasiswa.
3. Bapak Muhammad Arsyad, S.pd.I, M.AP. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Ibu Nida Urahmah, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Orang Tua, saudara-saudari dan teman-teman peneliti yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik secara moril dan materil.
6. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian penulisan proposal skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Untuk menyempurnakan proposal skripsi ini, peneliti dengan senang hati akan menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Sehingga di kemudian hari peneliti dapat menyempurnakan skripsi ini dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah peneliti lakukan. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kadundung, Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Hasil Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Teoritis	13
1. Implementasi	13
2. Kebijakan Publik	16
3. Implementasi Kebijakan Publik	20
4. Pengertian Program	35
5. Pengertian Implementasi Program	37
6. Program Satu Desa Satu Paud	38
C. Kerangka Pemikiran	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Lokasi Penelitian	43

B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Tipe Penelitian.....	43
D. Data dan Sumber Data.....	44
E. Desain Operasional Penelitian.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Teknik Analisa Data	48
H. Uji kredibilitas Data	49
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

<u>Tabel 3. 1 Informan Penelitian</u>	45
<u>Tabel 3. 2 Desain Operational Penelitian</u>	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	42
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fondasi penting bagi tumbuh kembang anak dalam masa keemasan (*golden age*), yaitu usia 0-6 tahun. Pada tahap ini, aspek perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, seni, moral, dan agama sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan layanan pendidikan yang diterima. Pada masa inilah struktur otak berkembang dengan sangat pesat dan menentukan kualitas kehidupan anak di masa mendatang. Pendidikan pada usia dini menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi yang berkualitas, cerdas, sehat, dan berkarakter. Program Satu Desa Satu Paud adalah upaya strategis pemerintah (pusat dan daerah) untuk menjamin bahwa setiap desa memiliki setidaknya satu lembaga PAUD. Tujuannya adalah agar akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini merata, tanpa bergantung lokasi atau status ekonomi desa. Dengan memiliki PAUD di setiap desa, diharapkan anak-anak usia 0-6 tahun tidak perlu menempuh jarak jauh, sehingga kehadiran, partisipasi, dan kualitas pendidikan akan meningkat. dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi masyarakat pedesaan.

Penelitian dan kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa PAUD yang berkualitas memiliki dampak besar bagi kesiapan anak memasuki jenjang berikutnya, mempermudah adaptasi di SD, mengurangi kesenjangan pada awal pendidikan, dan meningkatkan hasil belajar jangka panjang. Oleh karena itu,

penyediaan layanan PAUD yang merata dan berkualitas merupakan kebutuhan mutlak dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD, khususnya pada pasal 6 ayat 1 yang berisi tentang pemerintah Daerah Kabupaten, Kota, dan Pemerintah Desa untuk mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 desa atau Kelurahan terdapat 1 PAUD artinya secara regulatif ada acuan bahwa tiap desa atau kelurahan harus memiliki paling tidak satu lembaga PAUD . Aturan ini mengamanatkan Pemerintah Desa untuk mengupayakan ketersediaan layanan PAUD di setiap desa atau kelurahan.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat Peraturan Bupati (PERBUB) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Dengan pelaksanaan pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra-sekolah dasar. Perbub ini mencakup standar penyelenggaraan, tenaga pendidik, kurikulum, pelaporan, pengawasan, dan peran masyarakat. Selain itu ada Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 terkait pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan PAUD dan Pendidikan Dasar. Regulasi-regulasi ini menjadi dasar penting dalam memastikan program PAUD dapat berjalan dengan baik di tingkat desa.

Namun kenyataannya belum semua wilayah di Indonesia memiliki akses merata terhadap layanan PAUD. Ketimpangan antarwilayah khususnya antara daerah perkotaan dan pedesaan masih sangat terasa. Ada desa-desa yang belum

memiliki lembaga PAUD sama sekali, terutama di daerah terpencil atau kondisi sosial-ekonominya kurang mendukung. Pemerintah menyadari adanya kesenjangan tersebut, sehingga pemerintah meluncurkan berbagai program untuk memperluas akses PAUD, dan Menyadari pentingnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini pemerintah indonesia menginisiasi “Program Satu Desa Satu PAUD”. sebagai bagian dari kebijakan pembangunan pendidikan inklusif dan merata. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap desa memiliki setidaknya satu satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi dan mampu memberikan layanan yang berkualitas, sehingga anak-anak usia dini di desa tidak perlu menempuh jarak jauh atau mengalami hambatan akses untuk mendapatkan layanan PAUD.

Program ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta target tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). “Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua”. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa sebagian besar satuan PAUD masih terkonsentrasi di wilayah kota, sementara banyak desa yang belum memiliki lembaga PAUD sama sekali. Hal ini menyebabkan banyak anak usia dini terutama yang tinggal di pedesaan tidak mendapatkan layanan pendidikan awal yang memadai

Implementasi program “Satu Desa Satu PAUD” di berbagai daerah menunjukkan dampak positif terutama dalam meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) PAUD. Namun pelaksanaan program ini tidak lepas dari tantangan, seperti kondisi geografis, pelayanan publik yang masih terbatas, dan

variabilitas kapasitas aparatur pendidikan menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi Program Satu Desa Satu PAUD. Dan beberapa desa mungkin masih minim fasilitas, kurangnya infrastruktur, kurang tenaga pendidik berkualitas, atau kurangnya dukungan dari sumber daya keuangan dan anggaran daerah. Selain itu, faktor budaya, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, serta koordinasi antar stakeholder (pemerintah desa, dinas pendidikan, masyarakat) juga memengaruhi pelaksanaan program.

Di kabupaten Hulu Sungai Tengah, Khususnya Kecamatan Labuan Amas Utara, terdapat 16 desa yaitu: Banua Kupang, Rantau Keminting, Kasarangan, Kadundung, Pemangkih, Pemangkih Seberang, Parumahan, Binjai Pemangkih, Tungkup, Samhurang, Tabat, Pahalatan, Binjai Pirua, Sungai Buluh, Mantaas, dan Rantau Bujur. Diantara 16 desa tersebut tidak semuanya memiliki lembaga satuan PAUD hanya beberapa desa saja yang memiliki lembaga PAUD. Yang tidak memiliki lembaga PAUD ada beberapa desa yaitu: Mantaas, Rantau Bujur, Sungai Buluh, Binjai Pirua, Pahalatan, Pemangkih Seberang, Kasarangan, Rantau Keminting, dan Banua Kupang.

Lebih jauh lagi kualitas layanan PAUD juga menjadi permasalahan yang kompleks. Banyak satuan PAUD di desa yang belum memenuhi standar nasional PAUD dari sisi kurikulum, sarana prasarana, hingga kualifikasi pendidik. Oleh karena itu selain mendorong kuantitas melalui pendirian lembaga PAUD di setiap desa, perhatian terhadap kualitas penyelenggaraan juga menjadi prioritas utama agar tujuan program ini benar-benar tercapai.

Kebijakan dan regulasi di tingkat pemerintah daerah penting sebagai payung hukum dan pedoman operasional untuk pelaksanaan PAUD.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa fenomena masalah yaitu:

1. Minimnya Dukungan Regulasi dan Komitmen di Tingkat Desa

Banyak desa di Kecamatan Labuan Amas Utara belum menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang PAUD ataupun mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung penyelenggaraan PAUD. Hal ini melemahkan dasar hukum dan komitmen desa terhadap Program Satu Desa Satu PAUD.

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 yang menegaskan peran Pemerintah Daerah dan Desa dalam penyelenggaraan Pendidikan serta Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 yang mengamanatkan peran serta masyarakat dan pemerintah desa dalam PAUD Holistik dan Integratif.

2. Sarana dan Prasarana Tidak Memadai

Fasilitas belajar di banyak PAUD desa masih sangat terbatas. Ada beberapa yang masih menggunakan rumah warga, balai desa, ataupun bangunan seadanya tanpa perlengkapan pendidikan anak seperti alat bermain edukatif, buku anak atau toilet anak yang layak

Hal ini bertentangan dengan Peraturan **Permendikbud No. 137 Tahun 2014** tentang Standar PAUD terdapat bab tentang standar sarana dan prasarana, termasuk luas minimal lahan, ruang kegiatan anak, fasilitas pendukung, keamanan, kebersihan dan kesehatan.

3. Ketimpangan Akses PAUD antar Desa

Implementasi Program Satu Desa Satu PAUD belum merata. Beberapa desa sudah memiliki PAUD aktif, tetapi desa lain belum memiliki PAUD sama sekali atau hanya berbentuk layanan informal tanpa legalitas. Hal ini menciptakan kesenjangan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2018 yang mengamanatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan untuk seluruh masyarakat.

4. Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Pendidik masih terbatas

Banyak desa berhasil mendirikan PAUD secara fisik, tetapi tidak memiliki pendidik yang memenuhi syarat.

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pasal 7 ayat (1): “Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan standar nasional pendidikan.”

Melihat fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan menyusunnya dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Implementasi Program Satu Desa Satu PAUD di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus di Desa Parumahan dan Samhurang)”**.

B. Fokus Penelitian

Adapun Fokus Penelitian dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Satu Desa Satu PAUD di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus di Desa Parumahan dan**

Samhurang)” maka penulis menggunakan fokus teori dari Van Metter & Carl Van Horn (Leo Agustino, 2016: 150-153) diantaranya adalah:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implentasi Program Satu Desa Satu PAUD di Desa Parumahan dan Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Satu Desa Satu PAUD di Desa Parumahan dan Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi program satu desa satu paud di Desa Parumahan dan Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program satu desa satu paud di Desa Parumahan dan Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Dari aspek keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengembangkan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman peneliti khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik.
- b) Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan variabel penelitian.
- c) Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana proses pelaksanaan program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi dinas terkait, kepala desa, aparatur desa dan masyarakat yang terkait dalam pendidikan tentang Implementasi Program Satu Desa Satu PAUD di kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah .

a) Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi dan perbaikan Program dalam memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan desa dalam mengevaluasi implementasi Program Satu Desa Satu PAUD Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta rekomendasi untuk perbaikan program tersebut.

b) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu peneliti untuk dapat mengetahui penerapan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan realita yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan suatu program.

- c) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam peningkatan mutu penyelenggaraan PAUD di setiap desa, baik dari segi manajemen, SDM maupun sarana dan prasarana.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam hal mendukung penelitian ini, peneliti tentunya menggunakan penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi dan acuan untuk bahan perbandingan. Adapun hasil penelitian terdahulu peneliti cantumkan sebagai berikut:

1. **Asmirotun Nadwa, 2023, “Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bagi Suku Anak Dalam (SAD) Oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi”. Program Studi Kebijakan Publik. Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.** Penelitian ini membahas tentang implementasi program Pendidikan anak usia dini (PAUD) bagi suku anak dalam (SAD) oleh dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Latar belakang penelitian ini yaitu dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami kesulitan karena pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Suku Anak Dalam (SAD) tahun 2021 mengikuti kebijakan pendidikan di masa wabah. Mereka tetap mengusulkan kegiatan yang mendukung pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (*internal Childhood*) selama proses perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Pendidikan anak usia dini bagi suku dalam oleh dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sarolangun provinsi jambi. Penelitian

ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun dapat dikatakan telah melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi Suku Anak Dalam (SAD) dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih terdapat hambatan dalam implementasi program pendidikan anak usia dini pada suku anak dalam diantaranya adalah : Kurangnya Kesadaran bahwa Pentingnya pendidikan dari pihak Orang tua Suku Anak Dalam, Lingkungan yang kurang kondusif, dan kurangnya terlaksana perencanaan kegiatan yang dilakukan khusus untuk program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi Suku Anak Dalam (SAD).

2. **Herma Yulianti, 2023, “Implementasi Program Bunda Paud di TK Islam Mujahidin Pangkalan Bun Kalimantan Tengah” Universitas Islam Negeri Antasari. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.** Penelitian ini membahas tentang implementasi program Bunda Paud di TK islam Mujahidin Pangkalan Bun kalimantah Tengah. Latar belakang penelitian ini yaitu telah tercatat sebanyak 83 lembaga PAUD di Kota Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, tersebar di seluruh wilayah di tingkat kabupaten, Kecamatan dan di desa. Besar akan sebagian dari lembaga PAUD tersebut memberikan pelayanan namun tidak terintegrasi, kemudian ternyata masih banyak AUD yang belum terlayani secara maksimal. Oleh karena itu, layanan PAUD sangat dibutuhkan untuk menyelenggarakan lebih dari satu bentuk layanan PAUD sebagai bentuk PAUD terpadu, dengan pendekatan holistik terpadu. TK Islam Mujahidin merupakan TK PAUD satu-satunya yang mendapatkan sambutan baik oleh

lembaga-lembaga terkait. Kemudian peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada kepala sekolah dan guru yang ada di sana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk program Bunda PAUD dan bagaimana implementasi program Bunda PAUD dalam mewujudkan PAUD Holistik Integratif, dengan subjek kepala sekolah dan 1 orang guru di TK Islam Mujahidin Pangkalan Bun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data Miles & Huberman dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di TK Islam diketahui bahwa bentuk program Bunda PAUD terdapat 6 bentuk program yang dilaksanakan. Mendorong peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, mendorong konsumsi makanan sehat bergizi dan berkualitas, mensosialisasikan bahaya makanan ber MSG, mendorong terciptanya PAUD Holistik Integratif, harmonisasi kegiatan Bunda PAUD, dan pembinaan dan pengawasan layanan PAUD berkualitas. Bentuk implementasi program Bunda PAUD dalam mewujudkan PAUD Holistik Integratif terdiri dari 3 tahap yaitu perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program. Adapun pada tahap perencanaan terdapat pengelola, tujuan, sasaran, bahan ajar, metode belajar, media, metode evaluasi, tempat dan waktu, sumber belajar, kegiatan dan dana. Sedangkan pada tahap pelaksanaan terdapat tujuan, kegiatan, sumber belajar, materi, metode, waktu dan media. Dan pada tahap evaluasi terdapat 2 bentuk evaluasi yaitu evaluasi program dan evaluasi belajar.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna.

Menurut Ripley dan Franklin dalam Dr. La Mani (2020:92). Berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Menurut Teori George C. Edwards III Implementasi mencakup banyak kegiatan, meliputi, yaitu :

Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggungjawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar (komponen *resources* yang mencakup sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, informasi, kewenangan, sarana dan prasana.); **kedua**, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi serta rencana-rencana, dan desain program (komponen *communication bureaucratic structure* yang meliputi pelaporan, regulasi, instruksi konkret, desain program); **ketiga**, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja (komponen *bureaucratic structure* yang disebut struktur organisasi, unit kerja, hirarki,

prosedur rutin/tetap); *terakhir*, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada pelanggan atau kelompok-kelompok target yang berkaitan dengan *target group* dan bagaimana kebijakan berdampak pada kelompok sasaran; juga bagian dari bagaimana komunikasi, desain kebijakan dan regulasi diatur agar memberi manfaat maupun pembatasan kepada kelompok sasaran.

Dalam tataran praktik, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- c. Ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan, berkaitan dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan, ataupun tingkat kemajemukan yang dihadapi dimasyarakat. Sumber daya manusia sebagai implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik.

Adapun Model Top-Down adalah dalam literatur implementasi kebijakan, terdapat dua pendekatan utama yang sering dibandingkan, yaitu:

- a. Pendekatan Top-Down: Mengasumsikan bahwa implementasi yang efektif tergantung pada kejelasan tujuan, hirarki kebijakan yang kuat,

dan mekanisme kontrol yang terpusat. Model ini lebih menekankan pada peran aktor pusat atau pembuat kebijakan sebagai penentu utama keberhasilan implementasi.

- b. Pendekatan bottom-Up: Menekankan pentingnya peran aktor lokal dan pelaksana di lapangan (*street-level bureaucrats*), yang sering kali memiliki kebebasan dalam menyesuaikan pelaksanaan kebijakan berdasarkan kondisi lokal. Dalam pendekatan ini, interaksi sosial, konteks budaya, dan fleksibilitas birokrasi dianggap sangat penting.

Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, saat ini banyak digunakan pendekatan sintesis atau model integratif yang menggabungkan keduanya secara kontekstual.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Sahya Anggara (2014:257), ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*); (2) karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*); (3) lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*).

Lester dan Stewart Jr (Leo Agustino 2014:139) dimana mereka mengatakan bahwa “implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu : Tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang diraih”.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan ditetapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

2. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris "*policy*". Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan.

Sebagian besar para ahli memberi kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak bagi warga kehidupan warganya.

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa. Thomas R. Dye dalam Subarsono (2013:2) yang mengatakan bahwa "apapun peran pilihan pemerintah

untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*)”.

Harrold Laswell dan Abraham Kaplan (Subarsono, 2013:3) berpendapat bahwa “kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat”.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (Subarsono, 2013:2) adalah “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public to do or not do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah, disamping yang dilakukan pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik”. Definisi kebijakan publik menurut Thomas Dye mengandung makna bahwa :

- a. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
- b. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Atas dasar pengertian kebijakan publik yang telah disebutkan diatas, dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Anderson (Sahya Anggara, 2016:507) yaitu:

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.

- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan pemerintah.
- d. Kebijakan publik bersifat positif (mengenai tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang tertentu yang bersifat memaksa.

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah disebutkan diatas,

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan publik tersebut bisanya tertuang dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

b. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bagian terpenting dari kajian ilmu administrasi publik dewasa ini, kajian-kajian kebijakan publik terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin

kompleks akan pentingnya kebijakan publik yang baik. Tiga pilar utama dalam kebijakan publik yang menghiasi perkembangan ilmu administrasi publik, yaitu *policy formulation*, *policy implementation*, and *policy evaluation*. (Hayat, 2018:24).

Persoalan kebijakan publik seringkali mengabaikan prinsip-prinsip karakteristik yang melekat dimasing-masing negara. Setiap negara mempunyai karakter yang berbeda dengan negara-negara maju dalam segala aspeknya. Namun demikian, di negara-negara maju (Nugroho, 2015), dikutip dari Hayat (2018:25).

c. Bentuk kebijakan Publik

Riant Nugroho dikutip dari Hayat (2018:77-82) membagi bentuk kebijakan menjadi tiga bagian, yaitu undang-undang, peternalistik (bersikap seperti bapak), dan perilaku pemimpin. Bentuk pertama adalah undang-undang adalah bentuk akhir dari kebijakan publik yang dijadikan sebagai pedoman dan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai bentuk kebijakan publik, undang-undang, harus dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pembuatan undang-undang melibatkan seluruh stakeholder yang berkaitan untuk dapat dijalankan sesuaikan dengan tujuan yang diharapkan.

Bentuk kedua adalah peternalistik yakni berperilaku seperti ayah yang berkaitan dengan sikap pemimpin kepada pegawainya. Pemimpin berperilaku seperti bapak dan pegawai berperilaku seperti anak. Yang demikian itu adalah bentuk kebijakan yang melekat dan

terjadi disemua level kebijakan. Nugroho membagi paternalistik menjadi dua bagian, yaitu paternalistik konvensional dan paternalistik rasional. Paternalistik konvensional menjadikan pemimpin sebagai raja. Tidak hanya menjadi kewajiban bagi para bawahan untuk wajib dan tunduk pada titah pemimpin, tetapi itu sudah menjadi budaya yang melekat pada masyarakat.

Ketiga adalah perilaku pemimpin. Perilaku atau sikap pemimpin menjadi kebijakan publik. Dalam ranah yang agak vulgar pun hal itu dapat terjadi, bahwa kebijakan publik adalah sikap dari pemimpin itu sendiri. Korupsi menjadi salah satu contoh yang masih marak terjadi dalam kaidah bentuk kebijakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemimpin mengantarkannya pada kasus korupsi.

3. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada

tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik.

Pengertian implementasi kebijakan secara sederhana menurut Wahab dalam Sahya Anggara (2016:530) sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Selanjutnya, Wahab juga mengemukakan beberapa pandangan dari Pressman dan Wildavsky yang menyatakan bahwa kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan. Oleh karena itu, kajian implementasi kebijakan perlu mendapat perhatian seksama.

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. (Leo Agustino, 2016:126).

- b. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter & Carl Van Horn

Leo Agustino (2016:150-153) menyebut model implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh Van Metter & Carl Van Horn Model pendekatan *top-down* disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut Van Metter & Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat warga, maka sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang terssedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap

tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk mengubah perilaku manusia secara radikal, maka

agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap atau Kecendrungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat

dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter & Van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

c. Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III

Leo Agustino (2016:154-158) menyebut model implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh George C. Edward III terdapat 4 Variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi

diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat. Ada tiga indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula seringkali dalam penyalur komunikasi terjadi salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkat birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau ambigu.
- c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana di lapangan.

2) Sumber daya

- a) Staf; kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai atau kompeten dibidangnya. Diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan.

- b) Informasi; dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk. *Pertama*, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana yang telah ditetapkan.
- c) Wewenang; kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d) Fasilitas; fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementor mungkin mempunyai staf yang memadai, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. Jika pelaksanaan kebijakan ingin berjalan efektif maka pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Indikator disposisi ada 2 yaitu :

- a) Pengangkatan birokrat; jika ingin kebijakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

- b) Insentif; pada umumnya, orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, amaka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

4) Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang telah dibuat, maka hal ini akan menghambat jalannya proses implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah *Standar Operating Prosedures* (SOPs) dan Fregmentasi.

d. Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle

Leo Agustino (2016:159-162) menyebut Model implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh Merilee S. Grindle (1980). Pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

- 7. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

8. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

- a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
- b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy* (1980:5).

A. *Content of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. *Interest affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.
- b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. *Program Implementor* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

B. *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. *Power, interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

- b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan

dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

Sedangkan pendekatan *bottom-up*, memandang implementasi kebijakan dirumuskan tidak oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat. Pendekatan *bottom-up* berpangkal dari keputusan-keputusan yang di tetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Jadi intinya pendekatan *bottom-up* adalah model implementasi kebijakan di mana formulasi kebijakan berada di tingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, sistem sosiokultur yang ada agar kebijakan tidak bersifat kontraproduktif, yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri.

d. Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier

Leo Agustino (2016:163-167) menyebut Model implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi

variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan, variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar yaitu:

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi:

a. Kesukaran-kesukaran Teknis

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk di antaranya kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah.

b. Keberagaman Perilaku Yang Diatur

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas.

c. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran.

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan

dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

- d. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendakinya

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar atau sulit para pelaksana mencapai keberhasilan.

2. Kemampuan Kebijakan menstruktur proses Implementasi Secara Tepat

- a. Kecermatan dan Kejelasan Penjenjangan Tujuan-tujuan Resmi yang akan Dicapai
- b. Keterandalan Teori Kausalitas yang Diperlukan
- c. Ketetapan Alokasi Sumber Dana
- d. Keterpaduan Hirarki di Dalam Lingkungan dan di Antara Lembaga-lembaga atau Instansi-instansi Pelaksana.
- e. Aturan-aturan Pembuat Keputusan dari badan-badan Pelaksana
- f. Kesepakatan Para Pejabat Terhadap Tujuan yang Termaktub dalam Undang-undang
- g. Akses Formal Pihak-pihak Luar

3. Variabel-variabel di Luar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi

- a. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi
- b. Dukungan Publik
- c. Sikap dan Sumber-sumber yang Dimiliki Kelompok Masyarakat
- d. Kesepakatan dan Kemampuan Kepemimpinan Para Pejabat Pelaksana

4. Pengertian Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.

Program menurut bahasa adalah sebuah rancangan yang akan dilaksanakan. Sedangkan menurut istilah program adalah serangkaian petunjuk berupa perintah-perintah yang disusun untuk melaksanakan suatu tugas yang akan dikerjakan (Budi G. Siregar, dkk, 2023:21-22).

Menurut Spaulding dalam Khaerudin dan Nur Tjahjono Suharto (2022:10) suatu program adalah serangkaian kegiatan spesifik yang dilegasikan untuk tujuan yang dimaksudkan, dengan tujuan dan sasaran yang dapat diukur. Program berupaya untuk meraih tujuan dan sasaran yang diukur dengan perlunya merancang seperangkat dalam kegiatan tertentu.

Menurut Arikunto dan Jabar dalam Khaerudin dan Nur Tjahjono Suharto (2022:10-11) ada tiga pengertian yang perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu: (1) realisasi atau implementasi suatu kebijakan, (2) terjadi dalam waktu yang relatif lama, bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan dan (3) terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan demikian, pelaksanaan program dilakukan dalam kurung waktu yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan dan melibatkan sekelompok orang.

Program diartikan sebagai rencana atau kerangka kerja yang akan digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan. Program adalah serangkaian kegiatan yang diorganisir dengan baik dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, program melibatkan perencanaan yang terstruktur dan memiliki tujuan spesifik agar hasil pencapaian program tersebut dapat diukur dan dievaluasi. Program juga merupakan elemen penting dalam kerangka kebijakan, menjadi alat bagi unsur desa dalam upaya memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. (Budi G. Siregar, dkk, 2023:21).

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan (Mariati P. Simanjutak, dkk, 2020:97).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa program adalah serangkaian petunjuk atau rencana kerja yang terorganisir dan memiliki tujuan spesifik, yang disusun untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan dengan tujuan akhir yang diukur dan dievaluasi. Program mencakup seluruh kegiatan di bawah unit administrasi yang sama atau tujuan yang saling bergantung dan melengkapi, yang harus dilaksanakan baik secara bersamaan maupun berurutan. Program juga penting dalam kerangka kebijakan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Pengertian Implementasi Program

Implementasi merupakan sesuatu yang sangat penting dan utama di dalam sebuah penerapan suatu program, baik itu program di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, keagamaan, dan lainnya. Hal ini karena, implementasi program merupakan langkah-langkah dari pelaksanaan suatu kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri.

Menurut Jones, bahwa implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Maka dari itu, dalam pelaksanaan program tidak bisa dilakukan dengan serampangan, perlu adanya langkah-langkah terstruktur agar program bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Syukur, dalam proses implementasi terdapat tiga unsur yang penting yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- 2) Target grup yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat, perubahan atau peningkatan dari program tersebut.

- 3) Unsur pelaksanaan atau implementor, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi tersebut.

6. Program Satu Desa Satu Paud

a. Pengertian Program Satu Desa Satu Paud

Program Satu Desa Satu Paud adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan memastikan bahwa setiap desa memiliki minimal satu lembaga PAUD. Program ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua anak usia dini, khususnya di wilayah pedesaan yang selama ini minim akses terhadap layanan pendidikan dasar.

Menurut Mulyasa (2009) PAUD adalah sebagai upaya untuk mengembangkan seluruh potensi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun dengan pemberian stimulasi pendidikan yang tepat sehingga anak siap memasuki jenjang berikutnya. Yang berfokus pada pengembangan potensi anak.

Menurut Sudjarwo (2010) menekankan peran PAUD dalam peletakan dasar perkembangan fisik, kognitif, sosial-emosional, dan bahasa. Jika di rujuk dalam Program Satu Desa Satu PAUD, implikasinya adalah: lembaga PAUD di setiap desa harus mampu menyediakan lingkungan dan kegiatan yang mendukung

perkembangan holistik tersebut bukan sekedar ruang pertemuan atau penitipan saja. Yang berfokus pada aspek holistik perkembangan.

Menurut Mansur (2005) menekankan rangsangan jasmani dan rohani agar anak siap memasuki pendidikan dasar. Dengan demikian Program Satu Desa Satu PAUD bukan hanya soal angka lembaga melainkan juga soal kualitas rangsangan, kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana yang harus tersedia di desa.

Melalui program ini, pemerintah mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah desa, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mendirikan dan mengelola lembaga PAUD secara mandiri dengan dukungan kebijakan dan pendampingan dari pemerintah pusat dan daerah.

Tujuan utama program satu desa satu paud ini adalah:

1. Meningkatkan angka partisipasi kasar PAUD.
 2. Memberikan layanan Pendidikan dan Pengasuhan yang berkualitas sejak dini.
 9. Mendorong kesetaraan kesempatan belajar di seluruh wilayah Indonesia.
 10. Memperkuat peran desa dalam penyelenggaraan layanan PAUD.
- b. Manfaat Program Satu Desa Satu Paud
1. Meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak
3. Kesenjangan dalam Pendidikan
4. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
5. Meningkatkan kesadaran orang tua tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Mendukung Pembangunan SDM jangka Panjang.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah bagian dari satuan alur pemikiran seseorang terhadap apa saja yang sedang dipahaminya untuk dijadikan sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan yang sedang diteliti secara logis dan sistematis.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berhubungan dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD, khususnya pada pasal 6 ayat 1. Aturan ini mengamanatkan Pemerintah desa untuk mengupayakan ketersediaan layanan PAUD di setiap desa atau kelurahan. Dan PERBUB Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini holistik Integratif serta PERBUB Nomor 39 Tahun 2022 terkait pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan PAUD dan Pendidikan dasar. dan dalam kerangka pemikiran ini menggunakan teori

Implementasi menurut Van Metter & Carl Van horn (Leo Agustino, 2016: 150-153).

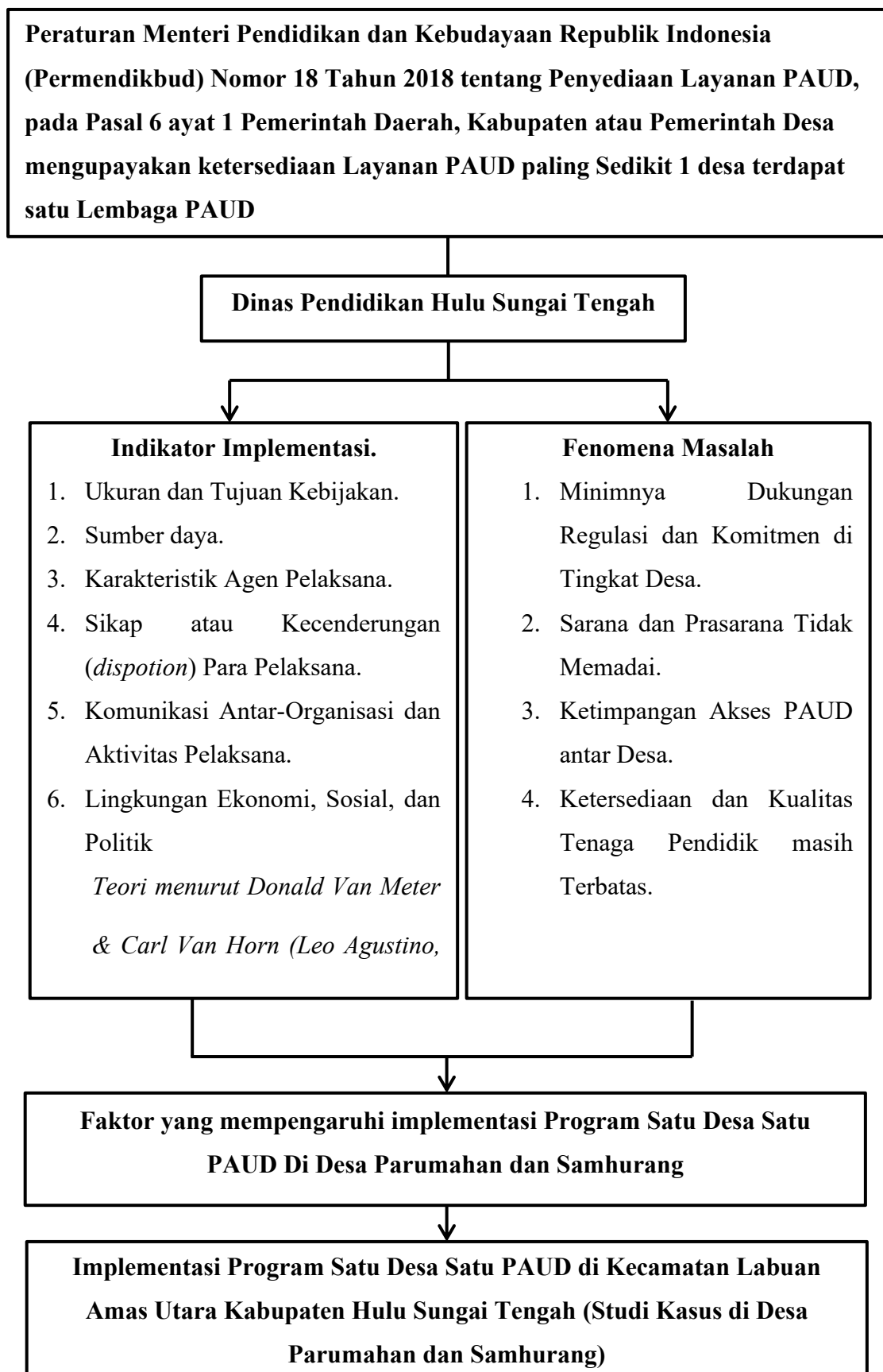
Van Metter & menyatakan bahwa pengukuran implementasi secara umum dan paling menonjol adalah:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumber daya.
3. Karakteristik Agen Pelaksana.
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana.
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa fenomena masalah yaitu:

1. Minimnya Dukungan Regulasi dan Komitmen di Tingkat Desa.
2. Sarana dan Prasarana Tidak Memadai.
3. Ketimpangan Akses PAUD antar Desa.
4. Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Pendidik masih Terbatas

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah di mana penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penentuan lokasi penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di PAUD Desa Parumahan dan Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kode Pos 71362.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Moleong dalam Abdul F. Nasution (2023:34) Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek Penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dengan judul “Implementasi Program Satu Desa Satu Paud di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Di Desa Parumahan dan Samhurang)” ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Deskriptif maksudnya adalah menggambarkan keadaan yang tampak di lapangan seperti apa adanya atau ingin menggambarkan segala

hal yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Metode ini dilakukan melalui wawancara, observasi serta diperlukannya dokumentasi yang valid dalam penelitian dengan tipe penelitian Deskriptif.

D. Data dan Sumber Data

1. Data primer

Menurut Abdul F. Nasution (2023:6) data penelitian primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer ini berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel, karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan. Data primer ini bisa berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Menurut Abdul F. Nasution (2023:6) data penelitian sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi, hasil observasi dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai merupakan sumber data utama. Jadi, dalam penelitian ini sumber data yang utama adalah informan (manusia), yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* sehingga terdapat informan kunci.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono 2020:289).

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mempunyai informasi yang objektif dari pendapat, pengalaman maupun hubungannya dengan pelaksanaan program Satu Desa Satu Paud Di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berikut merupakan tabel informan penelitian yaitu:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala sekolah	2
2.	Operator	2
3.	Guru	4
4.	Kepala Desa	2
5.	Dinas Pendidikan	1
6.	Masyarakat	3
		14

E. Desain Operasional Penelitian

Desain Operasional penelitian adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya suatu variabel atau suatu informasi ilmiah yang membantu Peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama.

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini maka desain operasional penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Desain Operational Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan dalam Teori Van Metter & van Hom (Leo Agustino 2016:153-158)	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	1. Ukuran Kebijakan 2. Tujuan Kebijakan
	Sumber Daya	1. Sumberdaya Manusia 2. Anggaran
	Karakteristik agen Pelaksana	1. Karakteristik Organisasi Formal 2. Karakteristik Organisasi Informal
	Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana	1. Komitmen Pelaksana 2. Penerimaan dari Masyarakat
	Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	1. Koordinasi antar organisasi 2. Komunikasi antar Petugas dengan masyarakat
	Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	1. Dukungan Lingkungan Sosial 2. Dukungan Lingkungan Ekonomi 3. Dukungan Lingkungan politik

Sumber: Dibuat peneliti

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki (Zuchri Abdussamad, 2021:147).

Pengamatan langsung (observasi) yaitu teknik pengumpulan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek Penelitian. Dengan demikian, pengamatan yang dilakukan dalam meneliti sejalan dengan pertanyaan Penelitian dan bermaksud untuk melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan aspek-aspek perbandingan dalam penelitian ini.

2. Wawancara/*Interview*

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2020:304).

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dengan melakukan tanggung jawab dengan baik yang ada hubungan nya dengan pembahasan ini. Wawancara dilakukan secara berstruktur.

3. Dokumentasi

Arikunto dalam Zuchri Abdussamad (2021:150) metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah kabar, majalah, prasasti, notulen, raport, leger dan sebagainya. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian kualitatif adalah dokumen yang relevan dengan focus penelitian dan dibutuhkan untuk melengkapi data.

Dokumen adalah kumpulan dari dokumen - dokumen yang dapat memberi keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses Pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebar meluas kepada pemakai informasi tersebut.

G. Teknik Analisa Data

Miles dan Huberman dalam Zuchri Abdussamad (2021:160-162) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. *Data display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam

melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, jejaring kerja dan chart.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Uji kredibilitas Data

Menurut Lapau dalam Agus R. Kumara (2018:51-52) uji kredibilitas adalah uji kepercayaan dari data yang telah dihasilkan selama proses penelitian kualitatif. Kredibilitas kesesuaian antara konsep peneliti dan konsep informan agar kredibilitas terpenuhi, maka hal yang dilakukan dalam uji kredibilitas ini yaitu:

1. Waktu yang digunakan penelitian harus cukup lama

Peneliti harus yakin selagi penelitian belum cukup meyakinkan, maka peneliti perlu melakukan perpanjangan waktu penelitiannya sambil mengkaji kembali, menelisik, dan menganalisis data yang telah terkumpul.

2. Ketekunan Pengamatan

Hal ini dilakukan untuk menjaga keakuratan dan keabsahan data.

3. Mengadakan triangulasi

Menurut Lapau, triangulasi merupakan pengecekan data atau sumber dari berbagai cara dan waktu yaitu: triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data.

4. Menganalisis kasus *negative*

Menganalisis kasus *negative* dilakukan dengan menemukan terlebih dahulu data yang bertentangan dengan data yang telah ditemukan sebelumnya.

5. Menggunakan alat bantu dalam mengumpulkan data

6. Menggunakan *member check*

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis, melakukan pengkategorian, dan penarikan kesimpulan dapat diuji kembali dengan menggunakan anggota lain dalam kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonim, 2003. Permendikbud Nomor 18 Tentang Penyediaan Layanan PAUD.
- Anonim, 2019. Peraturan Bupati Nomor 29 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- Anonim, 2018. Peraturan Daerah Nomor 1 Yang Menegaskan Peran Pemerintah Daerah dan Desa Dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
- Anonim, 2022. Peraturan Bupati Nomor 39 Terkait Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Pedoman penyelenggaraan Satu Desa Satu Paud. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Nonformal dan Informal*. Jakarta: Kemendikbud.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Khaerudin dan Suharto, N.T. 2022. *Pengantar Evaluasi Pendidikan Teori dan Terapannya dalam Pendidikan dan Pelatihan*. Yogyakarta: CV. Pustaka Felicha.
- Kumara, Agus Ria. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Mutiarin, Dyah dan Zaenudin, Arif. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- La Mani. 2020. *Implementasi Kebijakan Publik Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sabatier, P.A. 1986. *Top-down and Bottom-up approaches to implementation research a critical analysis and suggested synthesis*. Journal of public Policy, 6 (1) 21-48.
- Priansa, Donni Juni dan Damayanti, Fenny. 2021. *Administrasi dan Operasional Perkantoran*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Subarsono, A. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hayat, A. 2018. *Pengantar Kebijakan Publik: teori, proses, dan implementasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anggara, Sahya. 2016. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siregar, Budi G., dkk. 2023. *Evaluasi Program dan Kebijakan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Khaerudin & Suharto, Nur Tjahjono. 2022. *Evaluasi Program dan Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Raja Grafindo Pusada.
- Nugroho, R. 2015. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Simanjuntak, Mariati Purnama, et al. 2020. *Pengembangan Program dalam Pembelajaran*. Jakarta Utara: PT. Mediaguru Digital Indonesia.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Edisi Kedua. Bandung: CV. Alfabeta.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public policy*. Congressional quarterly press.
- Van Metter & Carl Van Horn. 1975:463. *Impelementasi Kebijakan*.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Asmirotun Nadwa, 2023. "Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bagi Suku Anak Dalam (SAD) Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi". Tersedia pada: <http://eprints.ipdn.ac.id/15672/1/REPOSITORY%20ASMIROTUN%20NADWA%201.pdf>
- Herma Yulianti, 2023. "Implmentasi Program Bunda Paud di TK Mujahidin Pangkalan Bun Kalimantan Tengah". Tersedia pada: <https://idr.uin-antasari.ac.id/24976/2/AWAL.pdf>
- Zellatifanny, Cut Medika dan Mudjiyanto, Bambang. 2018. "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi". *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*. Vol. 1, No. 2, hlm 83-90 <https://media.neliti.com/media/publications/278580-tipe-penelitian-deskripsi-dalam-ilmu-kom-a74b7b08.pdf>.